

Model Manajemen Sekolah Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sarana dan Prasarana di SMP Hidayatullah Kota Bengkulu

Oleh Ahmad Gawdy Prananosa¹
(Email: smaypasra_noman@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji model manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat dalam memenuhi layanan minimal sarana dan prasarana sekolah. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus. Setiap siklus meliputi kegitan, merencanakan, melakukan tindakan, pengawasan dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya model manajemen sekolah berbasis potensi (ide, tenaga, dan pemikiran) masyarakat dapat meningkatkan keterpenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata pada penerapan siklus III, menunjukkan hasil yang maksimal yaitu 83% sarana dan prasarana telah terpenuhi dan sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan

Kata kunci: partisipasi masyarakat, standar minimal sarana dan prasarana.

A. Pendahuluan

Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah sebagai bantuan, dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak digunakan secara optimal dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kelemahan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai.

Menurut Rohiat (2008:29), sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan keberhasilan pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. *Pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output-analysis* tidak dilaksanakan secara konsekuen. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan secara birokratik sentralistik sehingga penempatan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat bergantung pada keputusan birokrasi

yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan terkadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. *Ketiga*, peranserta warga sekolah, khususnya guru dan peranserta masyarakat, khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim, partisipasi masyarakat pada umumnya terbatas pada dukungan dana, sedangkan dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral dan material kurang diperhatikan.

Peranserta masyarakat hanya sebatas pemberian dana yang berwujud materi, tetapi memikirkan ataupun memberikan masukan yang cemerlang dan juga gagasan untuk perubahan demi kemajuan sekolah sangat minim sekali, padahal prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menitikberatkan kepada otonomi sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan sekolah tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat.

Hasil dari identifikasi masalah pada SMP Hidayatullah Kota Bengkulu, melalui

¹ Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Lubuklinggau

wawancara dengan kepala sekolah dan beberapa orang guru, terlihat bahwa peran serta masyarakat pada sekolah sangat minim sekali. Hal ini dibuktikan dengan tidak terbentuknya komite sekolah, dengan alasan segala urusan dikonsultasikan dengan pihak Yayasan Hidayatullah dan orang tua santri sangat jauh berdomisili dari sekolah. Pihak yayasan belum menerima santriwati dengan alasan asrama yang tidak memungkinkan dan setiap santri dan santriwati mesti tinggal dilingkungan sekolah SMP Hidayatullah atau kita kenal dengan *Boarding School* atau sekolah berasrama. Kemudian, sarana dan prasarana yang sangat kurang sekali, tidak adanya laboratorium baik IPA maupun komputer sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga SMP Hidayatullah mendapat nilai akreditasi (C), maka perlu partisipasi masyarakat baik secara materil maupun non materil terhadap kemajuan sekolah.

Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah pendidikannya dimulai dari TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya pada Sekolah Dasar mengalami kemajuan, dimana SD menerapkan sistem *fullday* tetapi tidak *boarding school*. Jika dianalisis bahwa potensi siswa untuk masuk ke SMP seharusnya banyak, karena SD siswanya cukup banyak dan ditambah dengan siswa dari SD yang lain, namun dalam realitasnya jumlah siswa alumni SD Hidayatullah yang melanjutkan ke SMP Hidayatullah sedikit. Diasumsikan manajemen SMP belum terkelola dengan baik

yang dibuktikan dengan kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam pemberian sumbaksi baik materi ataupun non materi. Perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan manajemen dari berpusat pada yayasan kepada manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Manajemen Sekolah Berbasis Partisipasi Masyarakat

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan yang melalui proses berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Menurut Rohiat (2008:14) mengemukakan bahwa manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, materil, mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.

Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek atau pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan. Pada konteks ini masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan.

Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua

program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat

2. Fungsi-fungsi Manajemen Sekolah

Fungsi manajemen perlu dipelajari dan dipraktikkan oleh personil sekolah dalam memberdayakan potensi-potensi yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah yang membuat kebijakan keputusan di sekolah, kepemimpinan tidak terlepas dari manajemen, kepemimpinan tidak akan berhasil tanpa manajemen yang baik, dengan demikian antara perilaku manajemen dan perilaku kepemimpinan harus bersinergi agar organisasi berkembang dan tujuan dicapai dengan optimal.

Manajer adalah seorang yang memiliki keahlian menjalankan tugas-tugas manajerial. Tugas-tugas manajerial mencakup fungsi organik dan fungsi substantif. Fungsi organik manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi. Fungsi

substantif manajemen berkaitan dengan pengelolaan personalia, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan lembaga dan layanan khusus.

3. Hakikat Manajemen Sarana dan Prasarana

Depdiknas (2007:6) menguraikan kompetensi yang harus dicapai oleh kepala sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana meliputi: a) merencanakan kebutuhan fasilitas, b) mengelola pengadaan, c) mengelola pemeliharaan, d) mengelola kegiatan inventaris, dan 5) mengelola kegiatan penghapusan.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan skema *educational action research* (penelitian tindakan kependidikan) (Burn, 2005: 293-310). Menurut Carr dan Kemmis dalam McNiff (1992:2) penelitian tindakan didefinisikan sebagai berikut:

Action research is form of self-reflective enquiry undertaken by participants (teacher, students or principles, for example) in school (including educational situation in order to improve the rationality and justice of a) their own social or educational practice, b) their understanding of theseparcatices and the situation (and instution) in which the practices are carried out.

Beberapa ide pokok yang tersirat dari pengertian di atas antara lain: 1) penelitian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri, 2) penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat didalamnya yaitu situasi yang diteliti (guru, siswa atau kepala sekolah), 3) penelitian tindakan dilakukan dalam situasi

sosial termasuk pendidikan, 4) tujuan penelitian tindakan adalah memperbaiki dasar pemikiran dan kepastian dari praktek-praktek, pemahaman terhadap praktek tersebut, serta situasi atau lembaga tempat praktek tersebut dilaksanakan. Penelitian tindakan ini direncanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta refleksi.

Kemudain, subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Subyek penelitian tidak selalu berupa orang, tetapi dapat benda, kegiatan dan tempat (Arikunto, 2002:116). Mengacu pada pendapat tersebut yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah segenap orang yang dipandang oleh peneliti dapat memberikan data tentang model manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan tentang kekuranglengkapan standar pelayanan minimal mata pelajaran IPA di SMP Hidayatullah Kota Bengkulu. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, dewan guru, siswa, komite sekolah dan Pengurus Yayasan Hidayatullah.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (2008:41) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pertanggungjawaban peneliti dilakukan melalui empat langkah yakni: 1) pengujian *kredibilitas* (nilai kebenaran) melalui memperpanjang masa pengumpulan data, pengamatan terus menerus, triangulasi, *peer debriefing*, analisis kasus negatif, dan *member-check*, 2) pengujian *transferabilitas* (nilai penerapan atau aplikasi) dilakukan dengan memberikan deskripsi hasil secara rinci, 3) pengujian *dependabilitas* (nilai konsistensi) dilakukan dengan audit trail dan 4) pengujian *konfirmabilitas* (nilai obyektivitas) dilakukan dengan mencatat dan merekam secara jujur (Burn, 2005: 301-303 dan Miles and Huberman, 2007: 3).

D. Hasil penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa masih banyaknya kurang standaran persentase komponen sarana dan prasarana di SMP Hidayatullah Kota Bengkulu, seperti komponen sarana ruangan kelas hanya terpenuhi 73 % artinya kurang 27 % untuk mencapai standar, ruang perpustakaan hanya terpenuhi 28 % artinya kurang 72 % untuk mencapai standar, ruang laboratorium IPA hanya terpenuhi 7 % artinya kurang 93% untuk mencapai standar, ruang pimpinan hanya terpenuhi 50 % artinya kurang 50% untuk mencapai standar, ruang guru hanya terpenuhi 11% artinya kurang 89 % untuk mencapai standar, ruang tata usaha hanya terpenuhi 8 %

artinya kurang 92 % untuk mencapai standar, tempat beribadah sudah memenuhi standar, ruang konseling hanya terpenuhi 22% artinya kurang 78 % untuk mencapai standar, ruang UKS hanya terpenuhi 13 % artinya kurang 87 % untuk mencapai standar, ruang organisasi kesiswaan hanya terpenuhi 40 % artinya kurang 60% untuk mencapai standar, jamban hanya terpenuhi 80% artinya kurang 20% untuk mencapai standar, gudang hanya terpenuhi 50 % artinya kurang 50% untuk mencapai standar dan tempat bermain atau berolahraga hanya terpenuhi 18 % artinya kurang 82 % untuk mencapai standar. Untuk lebih jelasnya mengenai komponen sarana dan prasarana di SMP Hidayatullah dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Persentase Sarana dan Prasarana

No.	Komponen Sarana dan Prasarana	Persentase Terpenuhi
1	Ruangan kelas	73%
2	Ruangan Perpustakaan	28%
3	Ruangan Laboratorium IPA	7%
4	Ruang Pimpinan	50%
5	Ruang Guru	11%
6	Ruang Tata Usaha	8%
7	Tempat Beribadah	100%
8	Ruang Konseling	22%
9	Ruang UKS	13%
10	Ruang Organisasi Kesiswaan	40%
11	Jamban	80%
12	Gudang	50%
13	Tempat Bermain atau Berolahraga	18%
Jumlah rata-rata persentase terpenuhi		38%

Jadi, rata-rata keterpenuhan standar sarana dan prasana di SMP Hidayatullah Kota Bengkulu hanya 38 % artinya kurang 62 % untuk memenuhi standar pelayanan minimal, maka dari itu partisipasi masyarakat terhadap sekolah terutama sumbangsi terhadap sarana dan prasarana sekolah sangat diharapkan.

Tanggungjawab sekolah bukan hanya pada pemerintah dan sekolah saja tetapi masyarakat juga bertanggungjawab terhadap perkembangan sekolah (sarana dan prasarana). Dengan model manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap kemajuan sekolah.

2. Pembahasan

Model manajemen sekolah berbasis potensi (ide, tenaga, dan dana) masyarakat untuk memenuhi kekurangstandaran pelayanan minimal sarana dan prasarana. Model manajemen sekolah berbasis potensi (ide, tenaga, dan dana) masyarakat untuk memenuhi kekurangstandaran pelayanan minimal sarana dan prasarana sekolah adalah model manajemen yang memberdayakan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap sekolah. Model manajemen sekolah berbasis potensi (ide, tenaga, dan dana) masyarakat tersebut merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kepada upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi sekolah (ketidakterpenuhan SPM) sarana dan prasarana.

Dari faktor-faktor yang perlu disediakan agar model manajemen sekolah berbasis potensi masyarakat dapat memenuhi kekurangstandaran pelayanan minimal sarana dan prasarana sekolah adalah faktor pembiayaan, faktor fasilitas, struktur organisasi, monitoring, dan evaluasi.

Kemudian, rumusan kebijakan dalam bidang manajemen pendidikan untuk meningkatkan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana sekolah adalah membuat peraturan sekolah seperti peraturan dalam penerapan model manajemen sekolah berbasis potensi masyarakat untuk memenuhi kekurangstandaran pelayanan minimal sarana dan prasarana sekolah, sehingga seluruh personil sekolah, komite dan masyarakat mendukung dan mentaati peraturan yang telah disepakati dalam melaksanakan model manajemen sekolah tersebut.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini secara umum adalah model manajemen sekolah berbasis potensi masyarakat dapat meningkatkan keterpenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana di SMP Hidayatullah Kota Bengkulu, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata pada penerapan siklus III, menunjukkan hasil yang maksimal yaitu 83% sarana dan prasarana di SMP Hidayatullah Kota Bengkulu telah terpenuhi dan sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert and Biklen 2008. *Qualitative Research for Education: An Introduction, to Theory and Methods*: Boston: Allyn and Bacon.
- Burn, Robert B. 2005. *Research Methods: Action Research*. Sidney: Longman
- Depdiknas. 2007. *Manajemen Sarana dan Prasarana*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen PMPTK.
- Mcniff, Jeans. 1992. *Action Research Principles and Practice*. London. Routledge.
- Miles, MS and Huberman, AM. 2007. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. <http://www.ed.gov/databased/qualidata.E> d54673534. Diakses 20 Mei 2014.
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah*. Bandung: PT Refika Aditama.